



Ni Putu Ninik Yuniati<sup>1</sup>  
 I Made Sumada<sup>2</sup>  
 Anak Agung Gde Raka<sup>3</sup>

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN KRAMA BALI SEJAHTERA (SIK-KBS) DI PROVINSI BALI

### Abstrak

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang mempunyai fungsi untuk memberikan informasi dalam menunjang pengambilan keputusan. Adanya desentralisasi sektor kesehatan menyebabkan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023. Kesehatan masuk pada misi ketiga yaitu Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan database riwayat kesehatan *Krama Bali* berbasis kecamatan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Untuk dapat melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kesehatan *Krama Bali* Sejahtera. Pencapaian SIK KBS sampai tahun 2022 belum sesuai dengan roadmap yang ditargetkan. belum semua masyarakat dan fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta menggunakan aplikasi SIK-KBS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan SIK-KBS, faktor penghambat, serta solusi dan upaya yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan SIK-KBS dapat berjalan optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Implementasi Kebijakan belum optimal karena faskes masih terikat dengan vendor lain dalam penggunaan aplikasi SIK. Faktor penghambatnya adalah SDM yang kurang memahami IT dan ketersediaan anggaran. Strategi yang dilakukan adalah sosialisasi dan koordinasi dengan sektor terkait.

**Kata Kunci:** Implementasi, Integrasi, Sistem Informasi Kesehatan

### Abstract

The Health Information System (SIK) is a subsystem of the National Health System (SKN) which has the function of providing information to support decision making. With the decentralization of the health sector, the development of regional health information systems is the responsibility of local governments. The 2018-2023 Bali Province Universal Planning RPJMD has been stipulated by Bali Provincial Regulation Number 3 of 2019 which outlines the vision, mission and programs of the Governor and Deputy Governor of Bali for the 2018-2023 period. Health is included in the third mission, namely developing affordable, equitable, fair and quality public health services and supported by the development of a district-based *Krama Bali* health history system and database. This is stated in the Regional Regulation of the Province of Bali Number 6 of 2020 concerning Health Administration. In order to be able to implement the Regional Regulation of the Province of Bali Number 6 of 2020, the Governor of Bali Regulation Number 6 of 2021 concerning the *Krama Bali* Sejahtera Health Information System has been stipulated. KBS SIK achievement until 2022 is not in accordance with the targeted roadmap. Not all communities and health facilities, both government and private health facilities, use the SIK-KBS application. This study aims to identify and analyze the implementation of the SIK-KBS policy, inhibiting factors, as well as solutions and efforts that can be made so that the implementation of the SIK-KBS policy can run optimally. The method used in this research is descriptive qualitative with the determination of informants using

<sup>1,2,3</sup> Universitas Ngurah Rai  
 Ninikyuniati87@gmail.com

purposive sampling technique. Policy implementation is not yet optimal because health facilities are still tied to other vendors in using the SIK application. The inhibiting factor is human resources who do not understand IT and budget availability. The strategy undertaken is socialization and coordination with related sectors.

**Keywords:** Implementation Integration Health Information System

## PENDAHULUAN

Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan keputusan atau kebijakan dan untuk menjalankan operasional. Sistem informasi dimanfaatkan oleh seluruh bidang pekerjaan tak terkecuali di Bidang Kesehatan (Chotimah, 2022).

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang mempunyai fungsi untuk memberikan informasi dalam menunjang pengambilan keputusan pada setiap tingkat administrasi kesehatan, baik pusat, propinsi, kabupaten/ kota, bahkan sampai unit pelaksana teknis seperti Rumah Sakit maupun Puskesmas. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) menjadi salah satu upaya yang digunakan untuk mengoptimalkan aliran data dari kabupaten/kota dan provinsi ke Kementerian Kesehatan sehingga dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat dan cepat, perlu diselenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi melalui komunikasi data (PMK RI nomor 92 tahun 2014).

Pada tahun 2002 Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.511 tentang “Kebijakan & Strategi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)” dan Keputusan Menteri Kesehatan No.932 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIKDA)”. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) di Kabupaten/kota adalah sebagai bagian sub sistem SIKDA yang ada di provinsi, sedangkan SIKDA yang ada di provinsi adalah bagian sub sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).

SIKDA seharusnya bertujuan untuk mendukung SIKNAS namun dengan teradanya desentralisasi sektor kesehatan mempunyai dampak yang negatif dimana terjadi kemunduran dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan secara nasional, seperti menurunnya kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data SP2TP/SIMPUS, SP2RS dan profil kesehatan. Dengan adanya desentralisasi, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun belum adanya kebijakan tentang standar pelayanan bidang kesehatan (termasuk mengenai data dan informasi) mengakibatkan persepsi masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan sistem informasi kesehatan yang dibangun tidak standar juga. Variabel maupun format input/output yang berbeda, sistem dan aplikasi yang dibangun tidak dapat saling berkomunikasi. Akibatnya data yang dihasilkan dari masing-masing daerah tidak seragam, ada yang tidak lengkap dan ada data variabel yang sama dalam sistem informasi satu program kesehatan berbeda dengan di sistem informasi program kesehatan lainnya. Terfragmentasinya sistem informasi kesehatan sebagaimana di atas, melandasi perlu dikembangkannya inisiatif Satu Data. Inisiatif ini penting untuk meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga dapat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023. Kesehatan masuk pada misi ketiga yaitu Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan database riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan kesehatan, dimana pada Bab V disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan SIK-KBS yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dimana aplikasi SIK-KBS paling sedikit memberikan informasi meliputi lokasi faskes, fasilitas dan pelayanan yang tersedia di faskes, pendaftaran pasien di masing-masing faskes dan ketersediaan ruang rawat/tempat tidur di masing-masing faskes yang memiliki rawat inap serta Riwayat Kesehatan Krama Bali. Untuk dapat melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera, yang bertujuan untuk memberikan informasi Kesehatan bagi seluruh Krama Bali secara online dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi Bali menjadi Satu Data Kesehatan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kasman (2018) disebutkan bahwa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan SIK antara lain : kurangnya SDM dalam mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi, fasilitas pendukung yang belum memadai, dan belum maksimalnya komitmen pimpinan kegiatan dalam mewujudkan pengelolaan dan informasi yang baik.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2021) dikatakan bahwa dukungan pimpinan terhadap penerapan SIKDA generik dinilai masih kurang. Ketiadaan pelatihan maupun bimbingan teknis mengenai pengimplementasian aplikasi secara berkelanjutan dikarenakan terbatasnya sarana prasarana, kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia serta kurangnya advokasi pimpinan puskesmas kepada kepala daerah.

Berdasarkan roadmap SIK-KBS 2021-2023, target yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu launching dan penerapan pada fasilitas kesehatan lain melalui Instruksi Gubernur Bali serta pengembangan aplikasi. Target sesuai roadmap dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini

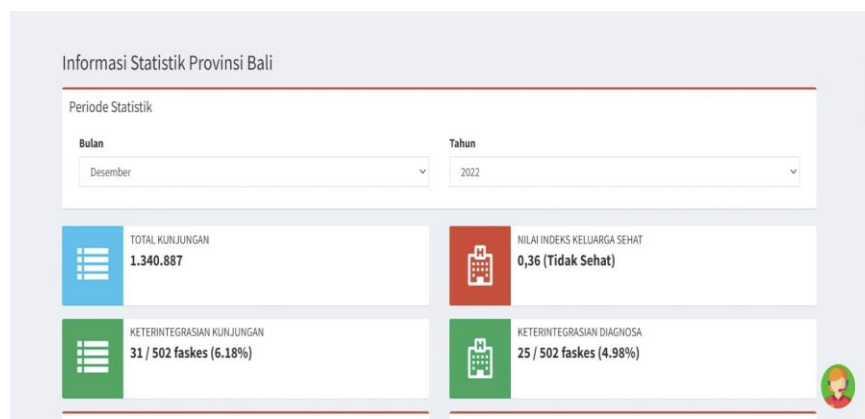


**Gambar 1.** Roadmap SIK-KBS 2021-2023

Pencapaian SIK KBS sampai tahun 2022 belum sesuai dengan roadmap yang ditargetkan. Sampai saat ini belum semua masyarakat dan fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta menggunakan aplikasi SIK-KBS. Sampai saat ini masyarakat yang sudah menggunakan user aplikasi SIK-KBS adalah 221 orang dari 44.151.000 penduduk Provinsi Bali. Begitupula dengan fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Bali, dimana dari 502 fasilitas kesehatan yang ada, baru 164 fasilitas kesehatan yang memiliki user (32,67%). Adapun fasilitas kesehatan yang sudah memiliki user yaitu sebanyak 62 rumah sakit dari 74 rumah sakit, 79 puskesmas dari 120 puskesmas, dan 23 fasilitas kesehatan lainnya dari 308 fasilitas kesehatan lainnya yang ada di Provinsi Bali.

Sampai dengan akhir tahun 2022 diharapkan seluruh fasilitas kesehatan sudah memiliki user SIK KBS terutama fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti misalnya puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah. Namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa fasilitas kesehatan milik pemerintah yang belum menggunakan aplikasi SIK-KBS yaitu fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

Demikian juga halnya terkait dengan keterintegrasian Aplikasi SIK-KBS dimana berdasarkan data SIK-KBS di bulan Desember 2022 menunjukkan bahwa terdapat 1.340.887 total kunjungan, dengan keterintegrasian kunjungan 31/502 faskes (6,18%) dan keterintegrasian diagnose 25/502 faskes (4,98%).



Data tersebut menunjukkan bahwa belum semua fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Bali menggunakan Aplikasi SIK-KBS. Seluruh *Krama* Bali seharusnya sudah dapat mengakses aplikasi SIK-KBS dan setiap fasilitas kesehatan harusnya sudah terintegrasi dengan SIK-KBS. Namun, pada kenyataannya masih terdapat fasilitas kesehatan yang belum mengakses aplikasi SIK-KBS dan terintegrasi dengan aplikasi SIK-KBS. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SIK-KBS belum optimal. Pemerintah mengharapkan dengan adanya peraturan Gubernur ini dapat menjadi pedoman bagi sektor terkait dalam mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi berbasis kecamatan secara online dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas melalui skema SIK-KBS

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penulisan yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS), mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS), dan untuk mengetahui dan menganalisis solusi dan upaya yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS) dapat berjalan dengan optimal.

Pendidikan karakter telah menjadi perhatian utama dalam dunia pendidikan modern sebagai respons terhadap perkembangan sosial dan moral dalam masyarakat. Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter positif mahasiswa. Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, pentingnya pendidikan karakter semakin ditekankan untuk menjaga keselarasan antara kemajuan akademik dan nilai-nilai moral. Meningkatnya kekhawatiran terhadap kurangnya sikap positif dan moralitas di kalangan mahasiswa menjadi dasar relevansi penelitian ini. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial masa depan perlu dibekali dengan sikap, nilai, dan perilaku yang positif agar mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam masyarakat. Pendidikan karakter di lingkungan universitas bukan hanya tentang menyampaikan pengetahuan akademik, tetapi juga tentang membentuk integritas, tanggung jawab, kerjasama, empati, dan nilai-nilai luhur lainnya. Sebagai bagian dari pendidikan karakter, universitas-universitas kini semakin menyadari perlunya mengintegrasikan pembelajaran karakter ke dalam kurikulum. Ini tidak hanya dilakukan melalui mata kuliah khusus, tetapi juga melalui suasana belajar yang mendukung pengembangan sikap positif. Pendekatan lintas disiplin dan interaktif menjadi esensial untuk mencapai tujuan ini.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan, analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi).

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang berlokasi di Jalan Melati Nomor 20, Kota Denpasar. Pemilihan lokasi ini karena dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 pada Bab V pasal 51 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pengembangan SIK-KBS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik Pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan

pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2013:368).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan SIK-KBS, faktor penghambat pelaksanaan kebijakan SIK-KBS, serta solusi dan upaya yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan SIK-KBS berjalan lebih optimal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Marilee S. Grindle yang terdiri dari dua variabel yaitu Isi Kebijakan (*content of policy*) dan Implementasi Lingkungan (*context of implementation*). Isi kebijakan meliputi : (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decision making*, yaitu letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources commited*, yaitu sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk implementasi lingkungan (*Contest of Implemnetation* ) meliputi : (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (2) *institution an regime characteristic*, yaitu karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

### Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS) di Provinsi Bali

Implementasi kebijakan SIK KBS berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Bali tahun 2021 dimana pelaksanaan SIK KBS mulai dikembangkan sejak tahun 2020. Saat ini proses pengimplementasian masih terus berkembang. Dalam proses perkembangannya tentunya tidak berjalan dengan mudah sehingga saat ini capaian implementasi SIK KBS belum mencapai target sesuai roadmap yang telah ditetapkan. Menurut teori yang dikembangkan oleh Grinde bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variable utama yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Namun pada penelitian ini masih terdapat komponen yang belum terimplementasi dengan optimal. Pada penelitian ini dapat diketahui jika belum semua fasilitas kesehatan memiliki user dan dapat berintegrasi dengan SIK KBS karena masih menjalin kerja sama dengan vendor lain dalam menjalankan sistem informasi kesehatan yang sedang digunakan sehingga masih membutuhkan waktu untuk dapat menggunakan SIK KBS. Untuk ketersediaan SDM di Provinsi Bali sudah mencukupi untuk menjalankan SIK KBS namun ketersediaan SDM yang bergerak di bidang IT dan menguasai penggunaan aplikasi di kabupaten masih kurang. Sedangkan jika dilihat dari konteks implementasi masih terdapat fasilitas kesehatan yang belum patuh dalam penginputan data sehingga proses pengintegrasian data belum optimal.

SIK KBS merupakan program yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan untuk mencapai Satu Data Kesehatan. Untuk mencapai itu seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Bali harus terintegrasi. Namun, pada kenyataannya masih terdapat fasilitas kesehatan yang belum dapat berintegrasi dengan SIK KBS karena masih terikat kerjasama dengan vendor lain dalam melaksanakan sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatannya masing-masing. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan *stake holder* dan fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Bali untuk dapat mempermudah proses pelaksanaan integrasi.

SIK KBS ini bisa menjangkau seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Bali dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sepanjang seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Bali sudah terintegrasi ke dalam SIK KBS, dan kedepannya Provinsi Bali memiliki sistem

*database* yang sangat kuat di mana semua datanya *real time*, dapat ditarik kapan saja dan dimana saja serta dapat digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa SIK diarahkan untuk pemantapan layanan informasi Kesehatan yang lebih cepat, valid, resource sharing; pemantapan SIK standar berbasis elektronik terintegrasi; dan pemantapan penerapan SIK di fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait pelaksanaan integrasi SIK KBS. Hal ini mendapat dukungan dari Pemerintah daerah di kabupaten kota namun di beberapa daerah belum bisa terlaksana karena masih terkendala belum tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan integrasi SIK-KBS.

Pengintegrasian data menjadi indikator penting dalam keberhasilan pengimplementasian SIK-KBS karena sejalan dengan tujuan program SIK-KBS yaitu Satu Data. Dengan tercapainya Satu Data Kesehatan akan memudahkan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.

Integrasi adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem sehingga dapat berfungsi sebagai satu kesatuan (Hammad et al, 2019, hlm 3). Integrasi data merupakan proses untuk menggabungkan data dari beberapa sistem yang berbeda untuk memberikan tampilan tunggal yang terpadu pada pengguna. Proses ini sejalan dengan dengan tujuan SIK KBS yaitu Satu Data Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan jika proses pengintegrasian data belum optimal sehingga pengimplementasian SIK KBS belum mencapai target untuk menjangkau seluruh masyarakat dan fasilitas kesehatan di kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali.

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sistem Informasi Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS) di Provinsi Bali**

Pelaksanaan SIK KBS sudah dikembangkan sejak tahun 2020 namun tentunya tidak dapat berjalan dengan mudah. Saat ini proses pengimplementasiannya dinilai belum optimal karena belum semua fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Bali terintegrasi. Hal ini karena masih terdapat fasilitas kesehatan yang memiliki sistem informasinya masing-masing. Namun selain itu, terdapat faktor penghambat lainnya yang menyebabkan pelaksanaan SIK KBS belum optimal. Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle yang menyatakan bahwa terdapat dua variable yang harus dipenuhi. Pada penelitian ini menunjukkan jika terdapat komponen yang belum dapat terpenuhi yaitu pada komponen pelaksana program yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang masih memiliki keterbatasan dalam menguasai IT. Tidak ada petugas khusus yang memang menguasai IT di fasilitas kesehatan. Petugas yang ada di puskesmas belajar secara otodidak dalam menjalankan sistem informasi kesehatan yang ada di puskesmas. Sedangkan pada komponen sumber daya yaitu belum tersedianya anggaran dalam pelaksanaan SIK KBS dan belum meratanya jaringan internet sehingga meyulitkan penggunaan aplikasi SIK-KBS.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahri, Astrini & Samsulan (2019) yang mengemukakan bahwa SDM yang kurang dapat menghambat pengimplementasian SIK. Penelitian ini mengacu pada tiga elemen penilaian yaitu input, proses dan output. Selain keterbatasan SDM, penelitian ini juga mengemukakan jika alokasi anggaran kurang dapat menghambat pengimplementasian SIK.

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia merupakan asset penting bagi setiap program, karena menentukan keberhasilan dari program untuk mencapai tujuan programnya tersebut (Krismiyati, 2017). Sumber daya manusia yang terlibat dalam SIK KBS perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan kemampuan kerjanya.

Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mempersiapkan para pengguna aplikasi SIK KBS dalam mengikuti perubahan maupun perkembangan globalisasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Cahyono, 2018) yang mengungkapkan bahwa program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan etos kerja. Menurut Sedarmayanti (2017), dengan adanya program

pengembangan SDM yang baik, organisasi atau perusahaan akan memiliki kekuatan kompetitif yang lebih berdaya guna dan mampu bersaing secara positif. Kaitannya dalam penelitian ini yaitu dengan adanya pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan aplikasi SIK KBS.

Faktor penghambat kedua yaitu belum tersedianya anggaran untuk mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan integrasi SIK KBS. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Dinanti (2022) yang menunjukkan jika implementasi sistem informasi kesehatan daerah generik pada beberapa Puskesmas di Pekanbaru belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana. Penelitian ini juga mengungkapkan jika gangguan jaringan sangat mempengaruhi pengoperasian sistem informasi.

Keberadaan jaringan internet yang belum merata juga dapat menghambat penggunaan aplikasi SIK KBS. Internet merupakan komponen penting yang harus ada pada era globalisasi saat ini. Hampir semua kegiatan membutuhkan jaringan internet. Untuk itu, pada wilayah yang belum memiliki jaringan internet lancar seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Begitu juga dengan penggunaan aplikasi SIK-KBS, agar pengimplementasian program ini berjalan dengan lancar seharusnya akses internet juga harus memadai.

Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Adapun standar global penggunaan internet sendiri telah memakai Internet Protocol atau Transmission Control Protocol (IP/TCP). Sistem informasi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan sistem manajerial atau pengelolaan. Sistem informasi ini merupakan kombinasi dari prosedur kerja, informasi, individu, dan teknologi informasi yang terorganisir (Ammenwerth, 2019, hlm 64-71).

Sistem informasi berkembang dengan begitu pesat karena pengaruh internet. Pasalnya, internet dapat menyediakan, menyimpan, serta memberikan akses informasi yang memudahkan masyarakat. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya untuk mendukung operasional dan manajemen. Komponen dari sistem informasi ini terdiri dari hardware, software, telekomunikasi, database dan data warehouses, serta sumber daya manusia dan prosedur.

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi adalah istilah yang juga merujuk pada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem informasi tidak hanya merujuk ada penggunaan organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), namun juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses suatu program. Tidak heran banyak orang memahami sistem informasi adalah seperangkat komponen teknologi yang saling terhubung untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, serta menyediakan informasi, pengetahuan, dan produk digital (Gavaran et al, 2017, hlm 403-408). Selain itu sistem informasi juga digunakan pada kegiatan pengelolaan keuangan perbankan, kegiatan pemerintah untuk menyediakan akses layanan masyarakat, hingga kegiatan pendidikan termasuk sistem informasi kesehatan. Hal ini dengan menyediakan berbagai informasi dan pengetahuan dalam berbagai format.

Sistem informasi, yang dalam penelitian berupa SIK KBS biasanya mengandalkan koneksi internet. Melalui sistem informasi ini, berbagai fitur yang terdapat dalam aplikasi SIK KBS dapat diakses dengan mudah. Internet mempunyai peranan penting untuk ketersediaan dan kemudahan akses informasi dari sistem informasi di masyarakat saat ini. Meskipun begitu, internet juga didukung oleh komponen-komponen lain yang membentuk sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan aktivitas sehari-hari bagi masyarakat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang menggabungkan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan jika keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dana, serta jaringan internet yang belum merata dapat menghambat pengimplementasian SIK KBS. Sumber daya manusia dikaitkan dengan kurang pemahaman dalam penggunaan aplikasi SIK KBS sehingga pengguna enggan untuk menggunakan aplikasi

SIK KBS serta masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang paham teknologi. Belum tersedianya anggaran menyebabkan fasilitas kesehatan tidak bisa menggunakan sistem informasi Kesehatan yang dapat diintegrasikan dengan SIK-KBS. Selain itu, jaringan internet merupakan salah satu komponen yang sangat penting agar aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar, maka dari itu pemerintah harus mengupayakan jaringan internet yang merata salah satunya yaitu dengan menggunakan internet satelit.

### **Solusi dan Upaya yang Dilakukan Agar Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS) di Provinsi Bali berjalan optimal**

Pelaksanaan SIK KBS belum optimal dikarenakan sumber daya manusia yang masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas, belum tersedianya anggaran dalam pelaksanaan SIK KBS di kabupaten serta jaringan internet yang belum merata. Untuk itu perlu adanya solusi dan upaya yang dilakukan agar pelaksanaan SIK KBS dapat berjalan dengan optimal. Upaya dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan SIK KBS yaitu dengan pemenuhan SDM yang bergerak di bidang IT yang mengerti dan menguasai tentang penggunaan aplikasi SIK KBS di fasilitas Kesehatan. Selain itu, sosialisasi, koordinasi dalam penyediaan anggaran dan pemerataan jaringan internet di wilayah Provinsi Bali juga sangat diperlukan. Sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman baik bagi pelaksana program ataupun penerima program dalam penggunaan aplikasi SIK KBS. Sosialisasi secara rutin diperlukan agar informasi dapat menyebar secara merata dan harapan nantinya semua fasilitas kesehatan dan masyarakat di Provinsi Bali dapat menggunakan aplikasi SIK KBS. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan SIK KBS tentunya juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di fasilitas Kesehatan dalam pelaksanaan SIK KBS. Selain itu, pemerataan jaringan internet merupakan indikator paling penting, jika tidak ada jaringan internet aplikasi SIK KBS tidak akan berjalan dengan lancar. Jika ketiga upaya tersebut dapat dioptimalkan maka dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan SIK KBS, sehingga tujuan dari Peraturan Gubernur nomor 6 Tahun 2021 tentang SIK KBS yaitu memberikan informasi kesehatan bagi seluruh krama Bali secara online dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi Bali menjadi Satu Data Kesehatan dapat terwujud.

Penelitian ini didukung oleh Chotimah (2022) yang mengemukakan bahwa pentingnya dilakukan sosialisasi untuk mengoptimalkan pengoperasian sistem informasi. Selain sosialisasi, penelitian ini juga mengemukakan pentingnya dilakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pengguna SIK KBS.

Sosialisasi merupakan proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang atau menambah informasi seseorang akan suatu hal yang penting. Pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat (Budiman, 2021). Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya untuk memahami penggunaan aplikasi SIK KBS.

Sosialisasi atau penyuluhan menjadi faktor utama keberhasilan dari program kebijakan. Agar sosialisasi berjalan dengan baik maka perlu dilakukan perencanaan yang baik. Perencanaan merupakan kegiatan merumuskan dan bertanggungjawab, peningkatan pengetahuan serta sasaran kegiatan. Perencanaan dilakukan setelah melalui beberapa tahap analisa, mulai dari analisa masalah dilanjutkan dengan menganalisa penyebab masalah (Wahyuni, 2014).

Pemahaman seseorang erat kaitnya dengan tingkat pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Perilaku dalam penelitian ini dikaitkan dengan kemauan pengguna aplikasi SIK KBS untuk dapat memahami penggunaan aplikasi SIK KBS. Pengetahuan merupakan hasil keingintahuan seseorang dan terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra seseorang, sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk pembentukan tindakan seseorang



(Notoadmojo, 2012). Oleh karena itu, tindakan seseorang didasarkan pada pengetahuan akan hal tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zahra, Andhani, & Dinanti (2022) yang mengemukakan bahwa pentingnya alokasi anggaran dana yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasana yang menunjukkan pelaksanaan SIK KBS. Penyediaan anggaran juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan integrasi SIK KBS. Karena sistem yang digunakan masing-masing pelayanan kesehatan berbeda-beda, menggunakan vendor yang berbeda dan semuanya berbayar. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2020) juga mengungkapkan hal yang sama yaitu anggaran dana yang mencukupi sangat mendukung keberhasilan sistem informasi.

Selain sosialisasi dan pemenuhan anggaran dana, meningkatkan jaringan internet menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Di era yang serba digital saat ini, jaringan internet menjadi hal yang sangat krusial. Internet digunakan untuk memenuhi semua jenis kebutuhan yang ada. Adapun jenis-jenis koneksi internet yang tersedia di Indonesia terbagi menjadi koneksi internet dengan kabel dan tanpa kabel. Koneksi internet nirkabel salah satunya adalah internet satelit. Jaringan internet satelit menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan karena dapat menjangkau wilayah pedesaan maupun pedalaman.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa solusi dan upaya yang dapat diterapkan yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai aplikasi SIK KBS secara menyeluruh dan berkala dan penyediaan anggaran di tahun selanjutnya. Jika dilihat dari jaringan internet, solusi yang dapat dianjurkan yaitu dengan menggunakan jaringan internet satelit yang dapat menjangkau pedesaan maupun pedalaman. Tentunya upaya dan solusi ini dapat terwujud seiring dengan berjalannya waktu. Upaya yang dilakukan harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, sehingga nanti disaat pengguna SIK KBS sudah memahami penggunaan aplikasi SIK KBS, semua fasilitas Kesehatan sudah berintegrasi dengan SIK KBS dan didukung dengan adanya jaringan internet yang maksimal akan mendukung keberhasilan pelaksanaan SIK KBS di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (2022) yang menunjukkan jika masih terdapat kendala dalam proses pengintegrasian data. Proses integrasi data yang masih terhambat yaitu integrasi dengan P.CARE BPJS dan Mobile JKN, serta integrasi rekam medis dengan Rumah Sakit Pemerintah, Swasta dan fasilitas kesehatan lainnya. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan koordinasi dan komunikasi antar pemegang kebijakan secara lisan maupun tulisan baik pusat maupun daerah, serta pembentukan tim lintas sektor dan lintas program termasuk dengan Dinas Kominfo Provinsi Bali.

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) menjadi salah satu upaya yang digunakan untuk mengoptimalkan aliran data dari kabupaten/kota dan provinsi ke Kementerian Kesehatan sehingga dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat dan cepat, perlu diselenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi melalui komunikasi data (PMK RI nomor 92 tahun 2014). Sistem informasi kesehatan merupakan wujud dari upaya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pengelolaan pembangunan kesehatan yang disusun dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa integrasi data belum dapat dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Bali karena beberapa fasilitas kesehatan sudah memiliki sistemnya tersendiri atau masih terikat kontrak dengan vendor lain dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatannya. Sehingga pelaksanaan integrasi SIK KBS di Provinsi Bali belum berjalan optimal.

## **SIMPULAN**

Implementasi Kebijakan SIK-KBS di Provinsi Bali belum optimal disebabkan proses pengintegrasian data yang belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh atau belum semua fasilitas kesehatan dapat menerapkan aplikasi SIK KBS. Belum tercapainya pengintegrasian secara menyeluruh disebabkan karena masih terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang telah terikat

kontrak kerjasama dengan vendor lain dalam menjalankan Sistem Informasi Kesehatan di fasilitas kesehatannya.

Faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan SIK KBS terdapat pada isi kebijakan yaitu tepatnya pada komponen pelaksana program dan sumber daya. Pada komponen pelaksana program berkaitan dengan sumber daya manusia yang masih kurang khususnya tenaga yang bergerak dibidang IT dan masih terdapat sumber daya manusia yang belum dapat menggunakan aplikasi berbasis digital. Dari komponen sumber daya yaitu ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan SIK KBS masih kurang dan jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Provinsi Bali.

Upaya dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan SIK KBS di Provinsi Bali yaitu dengan pemenuhan SDM yang bergerak di bidang IT yang mengerti dan menguasai tentang penggunaan aplikasi SIK KBS di fasilitas kesehatan, meningkatkan sosialisasi, koordinasi penyediaan anggaran dalam pelaksanaan SIK KBS dan pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah Provinsi Bali. Sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman baik kepada pelaksana program ataupun kepada penerima program. Penggunaan aplikasi SIK KBS masih perlu dilakukan sosialisasi agar informasi menyebar secara merata dan harapan nantinya semua dapat menggunakan aplikasi SIK KBS. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan SIK KBS tentunya juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di fasilitas Kesehatan dalam pelaksanaan SIK KBS. Selain itu, pemerataan jaringan internet merupakan indikator paling penting, jika tidak ada jaringan internet aplikasi SIK KBS tidak akan berjalan dengan lancar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chotimah. 2022. *“Implementasi Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia”* : Literatur Review. Jurnal Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan. Vol 2 No 1
- Dinas Kesehatan Provinsi Bali. 2019 : Buku Panduan Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat (SIK KBS) Web
- Kasman, “Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan”, Jurnal Ilmiah Betrik, Vol. 09, No. 01, April 2018
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
- Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta)
- Ulfa S.B, “Evaluasi Penerapan SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah) Generik di Puskesmas Biau Kabupaten Buol”. Tesis Politeknik STIA LAN, Makasar